

	No. Alumni Universitas:	MUTHYA MANDA YENNY	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/Tanggal Lahir : Padang/ 10 Maret 1992 b) Nama Orang Tua (Ayah/Ibu) : Budiman/Diana Gusti Iriani c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV) e) No. BP : 1010112092 f) Tanggal Lulus : 06 Mei 2014 g) Lama Studi : 3 Tahun 8 Bulan h) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan i) IPK : 3,44 j) Alamat : Komp.Unand Blok D III/07/13, Ulu Gadut, Padang		

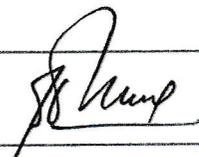
**Pelelangan Kayu Sitaan Hasil Tindak Pidana Pembalakan Liar (*Illegal Logging*)
Ditinjau Dari Pasal 45 KUHAP**
(Muthya Manda Yenny, 1010112092, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK IV (Hukum Pidana),
73 halaman, Tahun 2014)
(Pembimbing I: Aria Zurnetti, SH,M.Hum, Pembimbing II: Apriwal Gusti, SH)

ABSTRAK

Pelelangan merupakan suatu bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi yang berwenang, eksekutor di dalam eksekusi putusan pengadilan adalah instansi Kejaksaan, kejaksaan juga merupakan instansi yang mempunyai kewenangan luas dalam melakukan perubahan status benda sitaan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 45 KUHAP. Adapun permasalahan yang dibahas yaitu: a) Bagaimanakah pelelangan kayu hasil tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) oleh Kejaksaan Negeri Padang ditinjau dari Pasal 45 KUHAP? b) Apa saja faktor-faktor yang menghambat pelelangan terhadap kayu hasil tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) oleh Kejaksaan Negeri Padang? c) Bagaimanakah pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan kayu hasil tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Klas I Padang?. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *yuridis sosiologis*. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan lelang kayu hasil tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) oleh Kejaksaan Negeri Padang selain dilaksanakan pada taraf eksekusi putusan pengadilan juga dilakukan secara menyeluruh atau global. Dengan demikian, mengakibatkan kayu hasil tindak pidana pembalakan liar tidak layak lagi atau hancur karena penyimpanan dan pemeliharaan yang tidak efektif. Faktor- faktor yang menghambat pelelangan terhadap kayu hasil tindak pidana pembalakan liar (*Illegal Logging*) oleh Kejaksaan Negeri Padang seperti pengeluaran izin oleh Kejaksaan Agung RI membutuhkan waktu yang lama, kondisi kayu yang rusak dan hancur, dan penentuan harga limit terhadap kayu oleh Departemen Kehutanan yang lama. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan kayu hasil tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) di RUPBASAN klas I Padang belum efektif dan optimal disebabkan karena banyak kendala yang ditemui dalam menjalankan peranannya seperti kendala intern dan kendala ekstern. Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh KEJARI Padang belum berjalan efektif harus adanya tindakan yang cepat dan tegas oleh pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan lelang kayu hasil tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*). Dalam hal ini untuk mengurangi kerugian Negara yang besar dan mengutamakan keutuhan fisik dari kayu tersebut. Untuk itu KEJARI Padang lebih bisa mengupayakan secara maksimal dan mengambil suatu kebijakan yang tegas dan adil dalam pelelangan kayu sitaan hasil tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*).

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 06 Mei 2014.
Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda tangan	1. 	2. 
Nama terang	Yoserwan, SH., MH, LLM.	Nilma Suryani, SH., MH

Mengetahui,

Ketua Bagian Pidana: Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H.


Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

PELELANGAN KAYU SITAAN HASIL TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR (*ILLEGAL LOGGING*) DITINJAU DARI PASAL 45 KUHAP

(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Padang)

(Muthya Manda Yenny, 1010112092, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, PK IV (Hukum Pidana),72 Halaman, 2014)

ABSTRAK

Pelelangan merupakan suatu bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi yang berwenang, eksekutor di dalam eksekusi putusan pengadilan adalah instansi Kejaksaan, kejaksaan juga merupakan instansi yang mempunyai kewenangan luas dalam melakukan perubahan status benda sitaan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 45 KUHAP. Adapun permasalahan yang dibahas yaitu: a) Bagaimanakah pelelangan kayu hasil tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) oleh Kejaksaan Negeri Padang ditinjau dari Pasal 45 KUHAP? b) Apa saja faktor-faktor yang menghambat pelelangan terhadap kayu hasil tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) oleh Kejaksaan Negeri Padang? c) Bagaimanakah pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan kayu hasil tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Klas I Padang?. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *juridis sosiologis*. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan lelang kayu hasil tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) oleh Kejaksaan Negeri Padang selain dilaksanakan pada taraf eksekusi putusan pengadilan juga dilakukan secara menyeluruh atau global. Dengan demikian, mengakibatkan kayu hasil tindak pidana pembalakan liar tidak layak lagi atau hancur karena penyimpanan dan pemeliharaan yang tidak efektif. Faktor-faktor yang menghambat pelelangan terhadap kayu hasil tindak pidana pembalakan liar (*Illegal Logging*) oleh Kejaksaan Negeri Padang seperti pengeluaran izin oleh Kejaksaan Agung RI membutuhkan waktu yang lama, kondisi kayu yang rusak dan hancur, dan penentuan harga limit terhadap kayu oleh Departemen Kehutanan yang lama. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan kayu hasil tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) di RUPBASAN klas I Padang belum efektif dan optimal disebabkan karena banyak kendala yang ditemui dalam menjalankan peranannya seperti kendala intern dan kendala ekstrern. Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh KEJARI Padang belum bejalan efektif harus adanya tindakan yang cepat dan tegas oleh pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan lelang kayu hasil tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*). Dalam hal ini untuk mengurangi kerugian Negara yang besar dan mengutamakan keutuhan fisik dari kayu tersebut. Untuk itu KEJARI Padang lebih bisa mengupayakan secara maksimal dan mengambil suatu kebijakan yang tegas dan adil dalam pelelangan kayu sitaan hasil tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*).